

SUARA AKADEMIK

DPD PERPAMSI Sumut Menunggu Keseriusan Gubsu

Tidak terkecuali manusia, semua makhluk di muka bumi ini memerlukan air untuk hidup. Apalagi kecenderungan orang tentu akan lebih berat menahan haus dari pada menahan lapar, dan karena itu jika disuruh memilih makanan atau air, tentu lah air. Sebab, makanpun tanpa air minum tidak menyehatkan.

Justru, sebagai mana amanat Undang-Undang Dasar 1945

bahwa negara berkewajiban menyediakan hajat hidup orang banyak termasuk air bersih. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban menyediakan sarana air bersih untuk diakses oleh masyarakat. Jika belum ada harus dibangun sedang jika dalam keadaan kurang sehat atau sakit harus dibantu untuk sehat.

Di Sumatera Utara, baru 30 % masyarakat yang mendapat akses langsung pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedang sisanya 70 % lagi lebih masih menggunakan air di luar pengelolaan PDAM. Sementara 60 % PDAM di kabupaten/kota saat ini dalam keadaan kurang sehat dan sakit.

Melihat keadaan itu, wajar saja kalau Ketua DPD Persatuan Perusahaan Air Minum Daerah Indonesia (DPD PERPAMSI) Sumut Zaharuddin Sinaga, SE prihatin dan segera meminta perhatian serius Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho, ST dalam upaya percepatan penyehatan PDAM di kabupaten/kota tersebut.

Pemintaan itu berkaitan dengan program nasional *Millennium Development Goals (MDGs)*, yang merupakan deklarasi *millennium*, kesepakatan 189 negara di PBB pada KTT di Newyork yang di dalamnya ada sektor air bersih.

Merujuk dari kesepakatan itu, Indonesia diharapkan hingga tahun 2015 sebanyak 68, 8 % lebih penduduk sudah harus mendapatkan akses air bersih dari PDAM. Akan tetapi, target itu sungguh sangat sulit dapat terpenuhi setelah melihat kondisi sejumlah PDAM di daerah khususnya di Sumatera Utara.

Apalagi saat ini keadaan PDAM kabupaten/kota semakin sulit setelah seringnya mati lampu mengingat sejumlah pompa air termasuk peralatan lainnya menggunakan aliran listrik PLN. Meskipun menggunakan genset sebagai upaya alternatif, namun sama sekali tidak maksimal untuk menggerakkan pompa-pompa dan hal itu akan sangat menambah beban biaya operasional.

Melihat persoalan itu, DPD PERPAMSI Sumatera Utara telah menyurati PLN Wilayah Sumatera Utara agar segera mencari solusi terbaik terhadap pemadaman yang menyebabkan keadaan PDAM di kabupaten/kota semakin terpuruk dan bahkan kerugian serta komplek pelanggan yang semakin banyak.



Memang keadaan PDAM di Sumatera Utara semakin terimpit, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Selain sudah dalam keadaan sakit kini ditimpa lagi dengan seringnya mati lampu, sehingga tidak dapat maksimal memberikan pelayanan sementara kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin meningkat.

Zaharuddin menilai, satu-satunya upaya percepatan penyehatan 60 % PDAM di kabupaten/kota tersebut adalah dengan mengalokasikan anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategis (Renstra). Karena, jika berharap perbaikan itu dari anggaran PDAM sendiri, jauh panggang dari api, sangat sulit mengingat keterbatasan anggaran sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih semakin banyak.

Kita yakin Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho sebagai orang pertama di jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak lepas tangan melihat keadaan PDAM yang sakit di kabupaten/kota, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Meskipun PDAM milik daerah yang sudah otonom, akan tetapi itu tidak dapat dibiarkan begitu saja, sehingga keberadaannya seperti kerakap tumbuh dibatu, hidup segan mati tak mau. Karenanya, keterlibatan Gubsu sangat-sangat ditunggu untuk membantu penyehatannya.

Pemprov su tidak harus mempersoalkan untung rugi jika membantu upaya penyehatan PDAM di kabupaten/kota, sebab merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Gubsu bukan hanya dipilih oleh masyarakat Medan, sehingga bantuan hanya dikururkan ke PDAM Medan, tapi juga oleh masyarakat Sumatera Utara yang berada di 33 kabupaten/kota. DPD PERPAMSI menunggu keseriusan Gubsu dan masyarakat berharap bahwa Gubsu segera ikut memikirkan upaya percepatan perbaikan PDAM di kabupaten/kota salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran melalui RPJMD dan Renstra, dengan begitu masyarakat Sumatera Utara bisa mendapat akses langsung air bersih dari PDAM, hingga tingkat kesehatan juga bisa meningkat, cerdas dan jenius. Semoga.